

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan peneliti atas beberapa penelitian serta kajian ilmiah terdahulu serta beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu digunakan buat dikaji dan ditelaah secara akurat. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Yayuk Yuliwayati dan Muhammad Kamaluddin (2021). Dalam jurnalnya yang berjudul **Persepsi Konsumen Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar**. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengetahui pandangan konsumen terhadap upaya pengendalian sampah plastik melalui kebijakan kantong plastik berbayar Hasilnya, dari 25 informan, semua informan menyatakan bahwa kantong plastik merupakan hal yang praktis dipakai dan dibawa kemana mana akan tetapi bahan plastik berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup, sedangkan 15 informan menyatakan tidak setuju dengan kebijakan kantong plastik berbayar. 20 informan mengatakan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar belum tentu dapat mengurangi volume sampah plastik, dan 17 informan mengatakan pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, seluruh informan menginginkan pemerintah mengganti kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan.

Kedua, Amrita Nugraheni Saraswaty (2018). Dalam jurnalnya yang berjudul **Kebijakan Publik Dan Ritel Modern : Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak ekonomi dari kebijakan plastik berbayar terhadap pengusaha ritel modern. 53 sampel ritel modern di kabupaten Badung dan Kota Denpasar, baik yang beradalam jaringan ritel modern maupun tidak. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa, dari sisi ritel modern, ada kecenderungan untuk tidak membebankan tarif kantong plastik pada konsumen karena tidak ingin kehilangan konsumen. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa, dari sisi ritel modern, ada kecenderungan untuk tidak membebankan tarif kantong plastik pada konsumen karena tidak ingin kehilangan konsumen.

Ketiga, Yohanes Kopong Blolo (2021) .Dalam jurnalnya yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Denpasar**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar karena adanya Peraturan Walikota Denpasar No. 36/2018. Pendekatan ini menganalisis kinerja kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Responden adalah petugas DLHK Kota Denpasar dan informan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Keempat, Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih (2018). Dalam jurnalnya yang berjudul *Implementation Of Waste Management Policy Through waste Banks in Purbalingga Regency*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga dan mendeskripsikan faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga adalah partisipasi masyarakat, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah, dukungpendampingan dari pemerintah desa/kelurahan, tingkat pelayanan pengangkutan sampah, dan kondisi sosial politik masyarakat.



Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun Penelitian	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Yayuk Yuliyayati dan Muhammad Kamaluddin (2021)	Persepsi Konsumen Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar.	Kualitatif	1. Metode penelitian yang digunakan 2. Objek penelitian	1. Judul Penelitian 2. Studi Kasus 3. Hasil Penelitian 4. Teori yang digunakan	Sebagian besar konsumen belum menyetujui dampak akan pengurangan sampah plastik bagi kantong plastik, konsumen ingin menggunakan kantong berbahan ramah lingkungan.
2.	Kualitatif Amrita Nugraheni Saraswaty (2018)	Kebijakan Publik Dan Ritel Modern : Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar	Kualitatif Dekriptif	1. Metode penelitian yang digunakan 2. Objek Penelitian	1. Judul Penelitian 2. Studi Kasus 3. Hasil Penelitian 4. Teori yang digunakan	Perusahaan <i>retail</i> belum merasakan dampak yang signifikan terhadap perekonomian maka sebagian besar perusahaan <i>retail</i> belum menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. serta masyarakat masih tidak keberatan kalau plastik harus berbayar apabila wajib diterapkan di perusahaan <i>retail</i> .
3.	Yohanes Kopong Blolo (2021)	Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Denpasar	Kualitatif Dekriptif	1. Metode Penelitian yang digunakan	1. Judul Penelitian 2. Studi Kasus 3. Hasil Penelitian	Telah terjadi kerjasama yang baik diantara pelaksana dan kelompok sasaran sehingga membuat lancarnya penerapan kebijakan kantong plastik ini di Kota Denpasar.
4.	Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih (2018)	Implementation Of Waste Management Policy Through waste Banks in Purbalingga Regency	<i>Qualitative</i>	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Objek Penelitian 3. Teori Implementasi	1. Judul Penelitian 2. Studi Kasus 3. Hasil Penelitian	Penerapan kebijakan pengurangan sampah melalui bank sampah belum dikatakan optimal hal ini dapat dilihat dari kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat.

2.2 Pengertian dari Kajian Kepustakaan

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

2.2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Menurut Eystone (1971:18) dalam Wahab,2012 kebijakan publik merupakan hubungan yang berlangsung di antara uni atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Demikian menurut Wilson (2006) yang merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan. Menurut David Easton "*public policy is authoritative allocation of values for the whole society*". Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah atau paksa kepada seluruh masyarakat

Dari kumpulan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aktivitas atau program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat dan membutuhkan tindakan penyelesaian. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi atau mengatasi hambatan atau masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Secara umum, kebijakan publik seringkali diartikan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda, mulai dari pengertian yang terkesan sederhana hingga yang sangat rumit, baik secara konseptual maupun substansial (Ripley dan Franklin 1986 :48). Hal itu terjadi karena kebijakan publik selalu berada dalam ruang yang dinamis dan kompleks. Namun demikian terlepas dari pengertian dengan segala

perbedaan tersebut terdapat kesamaan pandangan bahwa kebijakan publik merupakan produk buatan pemerintah dan bahwa baik kebijakan untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan sesuatu memiliki bobot yang sama (Howlett dan Ramesh 1995:14).

2.2.1.2 Tahapan Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003) dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:

1. Tahap penyusunan agenda. Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan isu-isu dalam agenda publik. Sebelumnya, isu-isu tersebut berlomba-lomba masuk dalam agenda politik. Pada akhirnya, beberapa isu muncul sebagai agenda kebijakan pembuat kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan. Selanjutnya, isu-isu dalam agenda kebijakan dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah telah didefinisikan dan solusi terbaik telah ditemukan. Solusi untuk masalah ini datang dari berbagai pilihan yang ada. Pada tahap ini, setiap opsi bersaing untuk dipilih sebagai strategi untuk memecahkan masalah..
3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

5. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.¹

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.2.1 Konsep Implementasi

Sebuah kebijakan membutuhkan implementasi agar kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi publik karena menyangkut dengan kepentingan publik secara keseluruhan. Dalam tatanan itu, Jones (1994:166) berpendapat bahwa *“implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

Implementasi yang selama ini dianggap begitu sederhana ternyata menjelma menjadi sesuatu yang kompleks, melibatkan begitu banyak pasrtisan dengan berbagai perspektifnya melalui serangkaian jalan panjang dan berliku atau ruwet (Pressman and Wildavsky, 1973).

¹ Amrita Nugraheni Saraswaty. “Kebijakan Publik Dan Ritel Modern : Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar”, (Bali : E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.1.2018), Hlm. 119-120.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Menurut **Setiawan (2004:39)**, mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai tujuan ditetapkan atau diidentifikasi melalui pembuat kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh aktor yang berbeda untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

- **Teori George Edwards III (1980:1)**

1. Komunikasi

Komunikasi Menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi diantaranya ialah :

- Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien,

- Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga dapat membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu :

- Staf atau lebih tepat dikenal *Street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak mencukupi atau memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu :
 - a). Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
 - b). Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- Fasilitas implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

- **Teori Merilee S. Grindle (1980)**

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Tabel 2.2 Teori Merilee S.Grindle

No.	Variabel Isi Kebijakan	Variabel Lingkungan Kebijakan
1.	<i>Type of Benefits.</i> Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.	<i>Institution and Regime Characteristic.</i> Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
2.	<i>Extent of Change Envision.</i> Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.	<i>Compliance and Responsiveness.</i> Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
3.	Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.	
4.	<i>Resources Committed.</i> Apakah sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai.	

- **Teori Donald S. Van Meter Dan Carl E. Van Horn**

Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah :

- **Standar Dan Sasaran Kebijakan**

Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terstruktur dengan ketentuan tersebut tujuan dapat terwujud.

- **Sumber Daya**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi.

- **Komunikasi Antar Organisasi**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan anisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.

- **Karakteristik Agen Pelaksana Atau Implementor**

Koordinasi merupakan mekanisme yang tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi di antara pihak pihak yang terlibat dalam proses implementasi maka semakin kecil kemungkinannya akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik begitu pula sebaliknya.

- **Kecenderungan Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

- **Kondisi Ekonomi,Sosial Dan Politik**

Lingkungan sosial,ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi

kebijakan publik. Karena itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.

- **Teori Mazmanian dan Sabatier**

Teori Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis Implementasi. Model implementasi ini terpusat pada hubungan antara keputusan keputusan dengan pencapaiannya formula dengan implementasinya dan potensi hirarki dengan batas batasnya serta kesungguhan implementer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variable yaitu :



Tabel 2.5 Teori Mazmanian dan Sabatier

No.	Dimensi	Keterangan
1.	Independen,	Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2.	Intervening	Variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risoris konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana
3.	Dependen	Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahamandari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

- **Teori Implementasi Ripley dan Franklin**

Menurut Ripley dan Franklin ada tiga dimensi cara implementasi kebijakan (Andy, 2010:51-52)

Tabel 2.6 Teori Implementasi Ripley dan Franklin

No.	Dimensi	Keterangan
1.	Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (<i>the degree of compliance on the statute</i>),	Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan madat yang telah diatur
2.	Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (<i>smoothly functioning routine and the absence of problem</i>)	Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3.	Terwujudnya dampak yang dikehendaki (<i>the leading of the desired performance and impact</i>)	Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.

Ripley and Franklin memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan seseorang atau individu bawahan terhadap seseorang atau individu atasan, dengan kata lain bawahan patuh terhadap atasan. Ripley and Franklin mengatakan bahwa paling tidak terdapat dua faktor kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: pertama banyak faktor non birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan yang kedua adanya program yang tidak terbentuk dengan baik. Perspektif kedua yaitu perspektif faktual yang mana berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Kedua, perspektif tersebut tidak kontardiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Dari perspektif kepatuhan, secara empiris, kita mulai mengenali adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen manajemen. Kecenderungan ini sejalan dengan perspektif faktual yang memperhatikan berbagai faktor non organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

2.2.3 Kantong Belanja

2.2.3.1 Kantong Belanja Sekali Pakai

Kantong belanja sekali pakai atau yang kita kenal dengan sebutan plastik merupakan kantong yang mudah ditemukan dimana mana. Kata plastik berasal dari Bahasa Latin, *Plasticus* dan Bahasa Yunani *Plastikos* yang artinya membuat, mencetak, atau membentuk. Material plastik berasal dari minyak bumi, berdasarkan kimia karbon, plastik merupakan rantai atom karbon yang sangat panjang atau disebut dengan sebutan polimer. Polimer alami terdiri dari air, kotoran lebah, kulit penyu, tanduk binatang, dan getah pohon yang melahirkan resin atau lateks. Dalam suhu dan tekanan tertentu, polimer dapat dimanfaatkan untuk dibuat sebagai barang-barang rumah tangga. Di tahun 1800 an, dari modifikasi polimer terbentuklah seluloid. Tahun 1900 an, terbentuklah Bakelit. (Klimchuck, Krasovec, 2007: 18).²

² Nurhablisyah, Yulianto Hadiprawiro. "Kabana, Kantong Belanja Ramah Lingkungan Sebagai Bagian Dari Green Marketing Studi Kasus: Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Perusahaan Ritel di Indonesia", (Jakarta Selatan : Jurnal Ippmunindra, 2013) Vol. 05 No.02. Hlm 163.

Di tahun 1977, Plastik digunakan sebagai kantong belanja. Tepatnya ketika Gordon Dancy, seorang pria asal Amerika Serikat yang khawatir terhadap penggunaan kertas sebagai kemasan, merancang kantong plastik untuk belanja. Saat itu, tas belanja yang digunakan masyarakat dunia masih berasal dari kertas, dimana sumber utama kertas adalah pohon. Dancy kemudian menawarkan idenya pada toko setempat dan mulailah plastik dikenal sebagai kantong belanja. (Burton, 2011:52).

2.2.3.2 Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan mulai berlaku dengan sanksi mulai denda jutaan rupiah hingga pencabutan izin usaha bagi para pelanggarnya. Peraturan ini sudah mulai diberlakukan sejak Juli 2020, dan peraturan ini sudah berlangsung hingga 3 tahun lamanya. Adapun manfaat dari pemakaian kantong belanja ramah lingkungan yaitu :

- Dapat dipakai berulang kali
- Kuat dan kokoh.
- Ramah lingkungan
- Bervariasi dan bewarna
- Mudah diperbaiki dengan jarum dan benang apabila robek

Penerapan peraturan ini sudah berlangsung diberlakukan kepada perusahaan perusahaan *retail* di Ibukota khususnya DKI Jakarta. Salah satu perusahaan *retail fashion* terlengkap, termurah dan terbesar di Jakarta ialah Ria Busana. Perusahaan tersebut menggunakan kantong belanja ramah lingkungan

yaitu *spunbond* atau *polypropylene* yang merupakan kain yang ramah lingkungan yang banyak digunakan saat ini sebagai bahan pengganti plastik. Berikut gambar *spunbond* Ria Busana :

Gambar 2.1 Spunbond Ria Busana



Ukuran M

Ukuran L

Sumber : Staff Kasir Ria Busana,2022

2.2.4 Sampah Plastik

2.2.4.1 Pengertian Sampah Plastik

Penyebab permasalahan lingkungan di Indonesia ialah sampah plastik. Limbah kantong plastik ini sangat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat, serta bisa menyebabkan pencemaran bagi tanah, Penggunaan yang tidak ramah lingkungan justru merugikan lingkungan (Anonymous, 2019). Jenis sampah dibedakan menjadi 2 jenis menurut Cecep D.S (2009) sebagai berikut :

1) Sampah organik, yaitu sisa makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan daging. Contoh sampah anorganik antara lain potongan logam dan pelat, berbagai jenis batu, pecahan kaca, tulang dan tulang.

2) Sampah anorganik, yaitu sisa plastik seperti logam, kaca, plastik, kertas dan keramik. Lihat proses penghancuran oleh organisme mikroba. Menurut Alex S (2006), sampah organik terdiri dari:

Pemerintah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Menghindari Dampak Lingkungan. Karena dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, maka perlu dilakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Basuki, H (1996), plastik tergolong sampah padat yang mencemari lingkungan bila dilepaskan ke lingkungan. Sampah menumpuk di alam dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sampah adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan dampak penggunaan sampah.

2.2.4.2 Dampak Penggunaan Kantong Plastik

Terdapat 2 dampak dari penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan menurut Nurhenu Karuniastut (2019), yaitu³ :

³ Bahagia, Irda Yunita, Riezky Marlia Susanti. "Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern Banda Aceh", (Aceh : Serambi Engineering.2019) , Hlm 552-553.

Dampak Positif :

1. Terbukanya lapangan pekerjaan.
2. Pengelolaan sampah dengan baik dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, seperti dapat diolah menjadi bahan bakar gas serta menjadi pupuk kompos.
3. Sampah plastik yang terbuang dapat diolah dan didaur ulang menjadi bahan bakar minyak.
4. Sampah plastik bisa disulap menjadi suatu hal yang bernilai ditangan orang yang kreatif dan terampil.

Dampak Negatif :

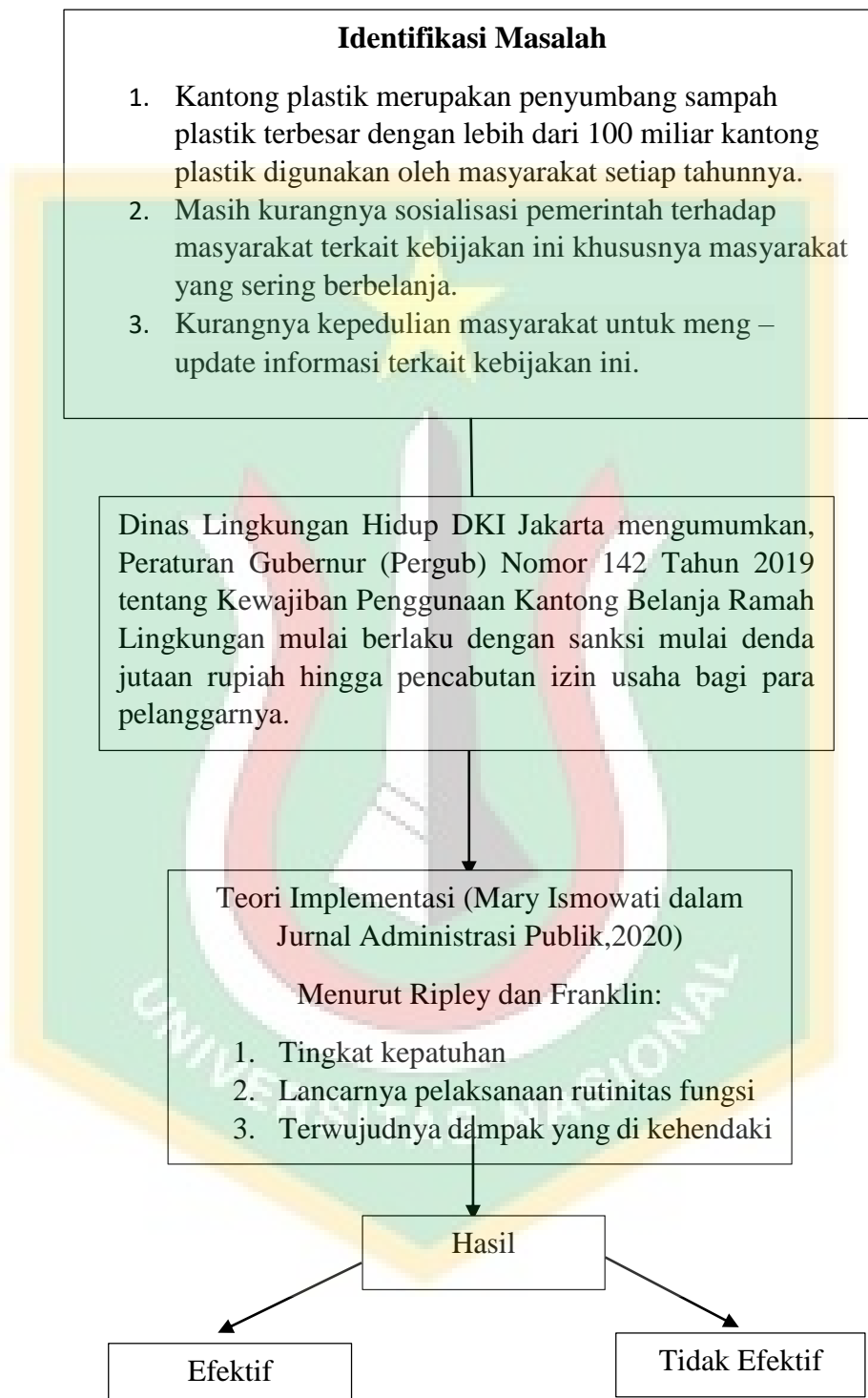
1. Sampah plastik dapat merusak ekosistem dunia.
2. Sampah plastik sebagai masalah global.
3. Sampah plastik susah terurai, maka dari itu sering menyebabkan bencana alam seperti banjir.
4. Sampah plastik dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup dan lingkungan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis hubungan antar variabel tersusun dari beragam teori yang telah diuraikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, yang mengarah pada sintesis hubungan antar variabel tersebut, yang kemudian dipergunakan merumuskan hipotesis (Sugiyono 2011:92).



Gambar 2.2. Skema Kerangka Berpikir



Sumber : Penulis,2022